JADWAL RETENSI ARSIP

PESAN BIJAK

“Apabila dokumen2 negara terserak pada berbagai tempat tanpa adanya *suatu mekanisme yang wajar*, yang dapat menundjukkan adanya dokumen2 tersebut, apabila berbagai dokumen negara hilang atau dimusnahkan se-mata2 karena *tidak disadari nilai2 dokumen2 tersebut oleh sementara pedjabat*, maka pemerintah tentu akan menanggung akibat dari pada hilangnja informasi, yang dapat *menjulitkan pemerintah dalam usaha2-nja memberi pelayanan kepada rakjat.*”

[Soeharto, Presiden RI, 1969-1998
pada Seminar Tropical Archivology, 1969]

JENIS ARSIP BERDASARKAN FUNGSI

ARSIP DINAMIS (*Records*) : arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

ARSIP AKTIF: arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus (unit kerja).

ARSIP INAKTIF: arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun (unit kearsipan)

Bahan Akuntabilitas

ARSIP STATIS (*Archives*) : arsip yang sudah tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip tetapi memiliki nilai guna kesejarahan (*historical value*) dan disimpan selamanya di lembaga kearsipan.

Memori Kolektif

KOMPOSISI IDEAL ARSIP PADA ORGANISASI

JADWAL RETENSI ARSIP (JRA)

- 20 % Arsip Aktif → Dikelola di unit kerja (*central file*)
- 30 % Arsip inaktif → Dikelola di unit kearsipan (*records centre*)
- 35 % Arsip tidak berguna → Dimusnahkan berdasarkan prosedur
- 10 % Arsip Permanen → Dikelola di lembaga kearsipan

Sistem arsip menyatu dalam proses bisnis setiap organisasi, ibarat aliran darah dalam tubuh yang tidak terlihat tapi menggerakkan. **Dapat dibayangkan ketika aliran darah dalam tubuh mengalami gangguan yang kronis..!**

Alat Bukti Hukum

**Bahan
Pertanggungjawaban**

**Pelindungan Aset dan
Kekayaan intelektual**

**Pelindungan Hak
Keperdataan rakyat**

**Pembelajaran bagi
Generasi Penerus
terutama generasi muda**

**Pendukung Pelayanan
publik**

**Identitas dan Memori
Kolektif**

**Perencanaan dan
pengambilan keputusan**

**Pelindungan Eksistensi/
keberadaan dan jati diri
bangsa**

UU No.43 Tahun
2009 ttg
Kearsipan

MANDAT

Pasal 48 ayat (1) (2) UU No. 43 Thn 2009 ttg Kearsipan

- 1) Lembaga negara, **pemerintahan daerah**, perguruan tinggi negeri, BUMN dan/atau BUMD wajib memiliki **jadwal retensi arsip (JRA)**
- (2) **JRA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan/atau BUMD.

Pasal 40 ayat (4) UU No. 43/2009 ttg Kearsipan

Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, **jadwal retensi arsip**, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip

JADWAL RETENSI ARSIP (JRA)

Pengertian

- JRA adalah daftar yang berisi sekurang kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip

Ketentuan

- JRA terdiri atas JRA fasilitatif dan substantif;
- Pimpinan pencipta arsip dapat menetapkan JRA setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI

JADWAL RETENSI ARSIP (JRA)

Manfaat

- Mengidentifikasi arsip inaktif yang akan dipindahkan (efisiensi);
- Mengidentifikasi arsip yang disimpan sementara dan arsip yang akan dimusnahkan (efisiensi);
- Mengidentifikasi arsip permanen (statis/bernilai kesejarahan) yang akan diserahkan kepada lembaga kearsipan (efektivitas).

JENIS JRA

JRA Fasilitatif

JRA Fasilitatif (*general records retention and general disposal authority*) untuk kegiatan yang bersifat pendukung (*housekeeping/supporting activities*), antara lain : arsip keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kehumasan, diklat, litbang, dll.

Mengacu kepada Perka ANRI tentang Pedoman Retensi Arsip

JRA Substantif

JRA substantif (*operational records retention and records disposal authority*) untuk kegiatan yang bersifat pokok (*operating activities*) antara lain: arsip pertanian, perhubungan, pendidikan, kesehatan, dll

Perka ANRI
Tahun 2012-
2016 ttg
Pedoman
Retensi Arsip

MENENTUKAN JENIS ARSIP DALAM JRA

Tahapan Penyusunan JRA

Berdasarkan perintah peraturan per-UU-an yang lebih tinggi atau kewenangan

Pembentukan Peraturan Peraturan Per-UU-an (UU 12/2011)

1 Perencanaan

1

Dibentuk tim penyusun, Meliputi pemrakarsa, unit hukum, dan unit kerja terkait, serta mengikutsertakan instansi pemangku kepentingan lainnya

2 Penyusunan

2

3 Pembahasan

3

Pemrakarsa mengundang unit kerja terkait untuk menyempurnakan naskah rancangan yang dihasilkan tim penyusun. Pemrakarsa menyampaikan naskah peraturan kepada unit hukum untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.

4 Pengesahan/ Penetapan

4

Penandatanganan oleh pimpinan instansi dan pemberian nomor oleh unit hukum

5 Pengundangan

5

Kepala unit hukum menyampaikan naskah asli peraturan yang telah dibubuhi nomor dan tanggal penetapan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

6 Penyebarluasan

6

Dalam bentuk seperti misalnya sosialisasi, bukan sekedar sosialisasi namun lebih ke arah pemberdayaan, agar menumbuhkan perubahan perilaku dalam pelaksanaan pengelolaan arsip. Perlu ditentukan siapa pelaku sosialisasi dan siapa sasaran sosialisasi

MUATAN JRA

1. Jenis Arsip

Unit informasi arsip (series, file/berkas, item) yang diciptakan, diatur dan dikelola sebagai suatu kesatuan konteks karena berhubungan secara fungsi atau subyek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama

2. Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip

- **Jangka waktu penyimpan/retensi arsip aktif**

Adalah jangka waktu penyimpanan arsip aktif di unit pengolah untuk mendukung pelaksanaan tupoksi.

- **Jangka waktu simpan/retensi inaktif**

Adalah jangka waktu penyimpanan arsip inaktif di unit kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga kearsipan

Narasi *Close file (cut off)* arsip pada Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip

- **Gabungan angka dan kata.**

Misalnya : 1 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai

- **Angka**

Misalnya : 2 tahun, 3 tahun

- **Dengan Kata-kata,**

Misalnya : sampai hak dan kewajibannya habis , sampai ditetapkan peraturan baru (untuk hak cipta/royalti, personal file)

MUATAN JRA (Lanjutan)

3. Keterangan

- **Permanen**

Adalah menyatakan bahwa arsip memiliki nilai guna sekunder/kesejarahan, sehingga wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangannya (ANRI, Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi).

- **Dinilai Kembali**

Adalah menyatakan bahwa arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian lagi.

- **Musnah**

Adalah menyatakan bahwa arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna lagi

Penentuan
nasib akhir arsip

JADWAL RETENSI ARSIP KOTA PEKALONGAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
I.	UMUM			
	A. KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN			
	1. Telekomunikasi	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Perjalanan Dinas DPRD	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Perjalanan Dinas Pegawai	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3. Perjalanan Dinas Luar Negeri			
	a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Perjalanan Dinas DPRD	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Perjalanan Dinas Pegawai	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	4. Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas, dan Fasilitas Kantor Lainnya	2 Tahun	2 Tahun	Musnah
	5. Rapat Pimpinan	2 Tahun	1 Tahun	Musnah. Kecuali

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows

Musnah. Kecuali

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	G. PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
	1. Kebijakan di Perencanaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)			
	a. Musrenbang Provinsi	2 Tahun	8 Tahun	Musnah Kecuali menyangkut renbang kota
	b. Musrenbang Nasional	2 Tahun	8 Tahun	Musnah kecuali menyangkut renbang Kota
	c. Musrenbang Kab/Kota	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	d. Musrenbang Kecamatan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	e. Musrenbang Kelurahan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	f. Musrenbang Desa	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	3. Perencanaan Pembangunan Daerah			
	a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang	2 Tahun sejak Penetapan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Rencana Anggaran Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

		a.	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
		b.	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
		c.	Berkas setor sisa dan a Pilkada/Pemilu Termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu Termasuk Diantaranya Bukti Transfer Bank	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
		d.	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu Termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	11.		Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah			
		a.	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti	3 Tahun	Permanen
		b.	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti	3 Tahun	Permanen
		c.	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti	3 Tahun	Permanen

LINGKUNGAN PENGELOLAAN ARSIP DI KOTA PEKALONGAN

KEBIJAKAN : TND, KLASIFIKASI, SKKAAD, JRA

Pencipta arsip di Lingkungan Pemkot Pekalongan

Penye rahan arsip statis

Pembinaan

Lembaga Kearsipan Daerah Kota Pekalongan

Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah

E-Arsip

BAHAN AKUNTABILITAS

Arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

E-Arsip

MEMORI KOLEKTIF BANGSA

SUMBER DAYA: SDM, Prasarana dan Sarana, Kelembagaan, Anggaran, dll

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS ...?

PENGERTIAN:

Adalah pengendalian arsip di lingkungan pencipta arsip secara

efisien

efektif

sistematis

meliputi:
penciptaan,
penggunaan dan
pemeliharaan,
penyusutan

TUJUAN

Menjamin ketersediaan arsip hukum sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah

Pasal 40 ayat (4) UU No. 43/2009 ttg Kearsipan
Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang
efektif dan efisien pencipta arsip membuat :

INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

PERAN JRA DALAM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Pekalongan

Kota Ini adalah kota yang indah

Namun sayang hanya sedikit bukti sejarah

Kota ini penuh cerita hebat dalam peradaban

Yang menunjukkan kemajuan pembangunan

Namun sayang tidak dibarengi dengan catatan

Kota ini akan memiliki bukti peradaban

Bukan karena berisi orang hebat dan pintar

Namun karena berisi orang-orang yang peduli.